



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Mei 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERU SETIAWAN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL
3. NHK : 56920

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.263.690.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/45 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/51 m2 di BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 33.150.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 480.540.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 168.750.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.750.000
3. MOBIL, ISUZU PANTHER KREDIT MPV Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 12.865.817**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.485.305.817

III. HUTANG Rp. 258.438.795**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.226.867.022

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.